

# INFO MARITIM

EDISI 8 TAHUN 2020



## Transportasi Laut Merajut Keberagaman dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi



## Transportasi Laut Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Rajut Keberagaman Nusantara

SURVEI yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri menemukan sejumlah realitas menggem-birkan dari pelaksanaan program Tol Laut yakni penurunan tingkat harga barang pokok, penurunan disparitas harga bahan pokok antara kawasan Indo-nesia Timur dan Barat.

Dengan demikian, program tol laut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kegiatan perdagangan sebagian besar komoditas pangan strategis terutama ikan segar, cabai dan bawang hingga terjadi penurunan biaya logistik ke tingkat konsumen.

Tol laut merupakan salah satu program strategis, yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut. Seiring dengan program tersebut, digelar secara berkesinambun- gan program pelayaran perintis. Dua program itu menjadi terdepan dalam mengkoneksikan wilayah terdepan, terluar dan tertinggal Indonesia, sekaligus menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggarisbawahi bahwa transportasi laut selain menjadi simpul konektivitas antarpulau juga merup- akan penghubung serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh pelosok Indonesia.

Infrastruktur konektivitas memadai menjadi jembatan ribuan pulau di seluruh pelosok Indonesia serta dihuni penduduk beragam suku, agama, ras maupun bahasa.

Dalam konteks itu maka transportasi laut menjadi penghubung sekaligus menjadi bukti dan merawat eksistensi kukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Wisnu)

### Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

### Pengarah

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut  
Direktur Kepelabuhanan  
Direktur Perkapalan dan Kepelautan  
Direktur Kenavigasian  
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

### Redaktur Pelaksana

Wisnu Wardana

### Redaktur

Benny Sanjaya Bahusin

### Penyunting/Editor

Silo Darmono

### Staf Redaksi

Presti Febriana  
Putri Mayan Kalingi  
Khrisna Dwi Nugraha  
Khairil Nur Wibowo  
Kandi Tri Astuti  
Jonius A Saragih  
Anik Vianti

### Desain Grafis & Fotografer

Tim Desain Grafis  
Indi Astono  
Abdurahman  
Dhia Hanifa Muti  
Achmad Luthfi

### Sekretariat

Rustam Hidayat  
Ibrahim Pilpala

### Alamat Redaksi

Gedung Karya Lt. 15. Kementerian Perhubungan  
Jl. Medan Merdeka Barat No.8. Jakarta 10110



021 – 3847118 ext. 4135



djplkemenhub151@gmail.com



@djplkemenhub151



Ditjen Perhubungan Laut dan Fan Page



djplkemenhub151



djplkemenhub151



# Transportasi Laut Merajut Keberagaman dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Transportasi laut memiliki peran penting dan strategis untuk merajut keberagaman dan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).



“Ribuan pulau yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dihuni penduduk beragam suku, agama, ras maupun bahasa dan perlu dijembatani dengan infrastruktur konektivitas yang memadai. Transportasi laut selain menjadi simpul konektivitas antarpulau juga merupakan penghubung serta menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di seluruh pelosok Indonesia,” urai Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Webinar Transportasi Untuk Merajut Keberagaman Episode 4: Moda Transportasi Laut, Senin (24/8/2020).

Dalam situasi krisis dampak pandemi ini pemerintah harus terus bergerak membuat terobosan untuk menciptakan lompatan kemajuan. Begitu juga dengan sektor transportasi khususnya di sub sektor Laut.

Beberapa pembangunan infrastruktur transportasi laut terus berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, seperti penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat, Pelabuhan Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dan Pelabuhan Gilimas Lombok.

Selain itu terdapat beberapa infrastruktur perhubungan laut yang pembiayaan pembangunannya akan dilaksanakan melalui skema pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah selain melalui APBN.

Di antaranya adalah pengembangan Pelabuhan Seba di Nusa Tenggara Timur dan pembangunan Menara Suar Tanjung Batu di Tarakan, Kalimantan Utara.

Menhub Budi Karya juga menyampaikan bahwa dimasa kondisi pandemi Covid-19 ini Kementerian Perhubungan terus melaksanakan salah satu program transportasi laut yang berperan langsung dalam merajut keberagaman, dengan

menciptakan kesetaraan dan pemerataan ekonomi yaitu Tol Laut.

Program yang telah dimulai tahun 2015 hingga kini telah mengoperasikan 26 trayek angkutan barang tol laut, 110 trayek pelayaran perintis dan enam trayek kapal ternak.

“Salah satu program yang berkaitan dengan upaya peningkatan konektivitas antar wilayah di Indonesia untuk kesetaraan perekonomian adalah tol laut. Program Tol Laut telah memberikan kontribusi dan manfaat dalam menekan angka disparitas harga, khususnya di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub. (Silo)



# 40 Persen Angkutan Kargo Dunia Melalui Perairan Indonesia



Angkutan kargo dunia merupakan salah satu bagian penting dalam memenuhi kebutuhan. Hingga saat ini 90 persenangkutannya menggunakan angkutan laut.

“90% angkutan kargo di dunia diangkut melalui laut dan sekitar 40% nya akan melewati perairan Indonesia,” ujar Dirjen Agus dalam Webinar Transportas Lauti untuk Merajut Keberagaman, Senin (24/8/2020).

Dirjen Agus menilai, pembangunan konektivitas laut itu sangat penting, tidak hanya di wilayah Barat saja tapi juga di Timur Indonesia.

Saat ini pertumbuhan ekonomi masih tinggi di Jawa, seperti di Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan dan Jawa Timur. Menteri Perhubungan tengah memfokuskan konektivitas ini di wilayah timur pulau terpencil di luar itu agar lebih fokus, sehingga dapat lebih merata.

“Berdasarkan isu strategis transportasi laut tahun 2020-2024, pihaknya juga akan

menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk mendukung konektivitas, kemudian melakukan integrasi dan pemerataan sehingga seluruh wilayah bisa menikmati aksesibilitas melalui jalur laut,” urai dia.

Percepatan pengembangan pelabuhan untuk meningkatkan ekonomi juga terus didorong, yang belum optimal bisa *upgrading* sarana dan prasarannya.

Seperti diketahui, saat ini ada 636 pelabuhan yang melayani angkutan laut. Terdiri dari 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan regional, dan 278 pelabuhan pengumpan lokal.

Sedangkan rencana lokasi pelabuhan sekitar 1.321 dan 55 Terminal lainnya ini masuk dari bagian dari pelabuhan umum. (Presti)

# Bupati Morotai Apresiasi Tol Laut Berhasil Kurangi Disparitas Harga

**Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Benny Laos sekaligus mewakili masyarakat di Pulau Morotai menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas program-program yang dijalankan oleh Pemerintah salah satunya Tol Laut.**



“Saya atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berterimakasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, kepada Kementerian Perhubungan khususnya Pak Menhub dan Pak Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian BUMN melalui PT Pelni, dan Kementerian Perdagangan yang telah menjalankan program Tol Laut,” tutur Benny saat menjadi narasumber dalam Webinar Transportasi Laut Merajut Keberagaman, Senin (24/8/2820).

Masyarakat Pulau Morotai disebutkan, telah merasakan arti daripada Kemerdekaan dengan semua kebijakan-kebijakan telah berjalan, sehingga dampak yang terjadi melalui proses Tol Laut ini dari tahun ke tahun telah melahirkan banyak dampak positif. Sebagaimana diketahui bersama, jika pertumbuhan ekonomi berjalan dengan positif akan menurunkan pengangguran dan kemiskinan.

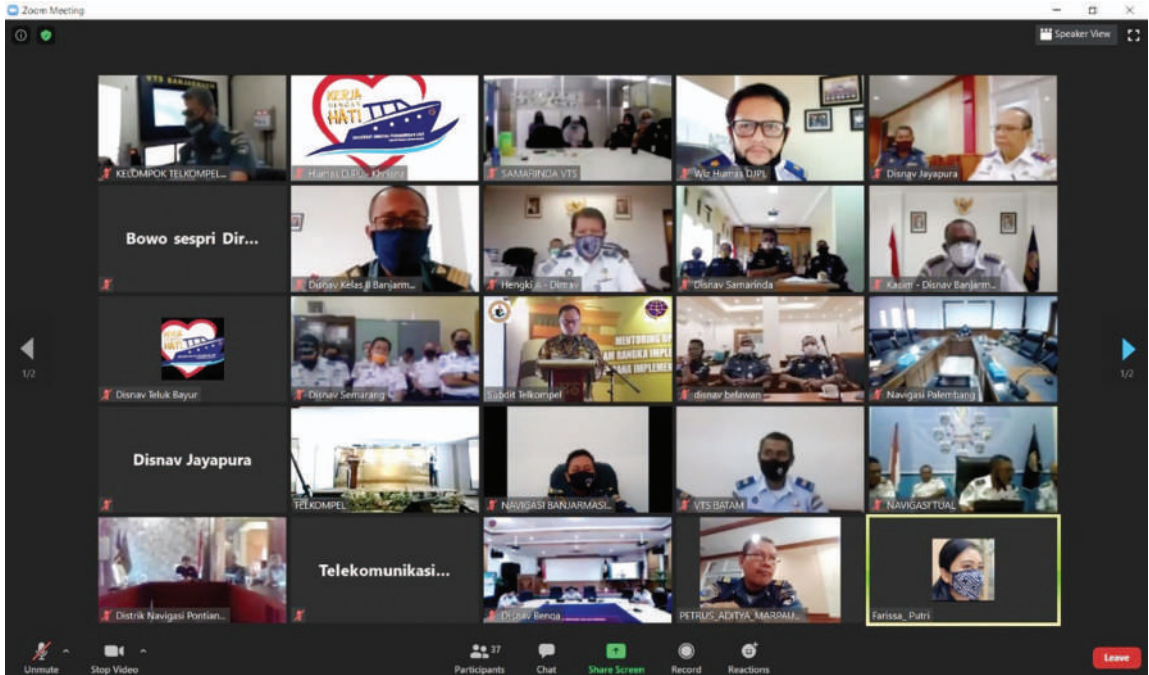
“Tol Laut juga telah menjadi konektivitas jembatan barang. Dulu Morotai

barangnya dari Bitung, sekarang kita telah langsung dari Surabaya ke Morotai. Sebelum ada Tol Laut, kita menggunakan kapal container dia turun ke Ternate sampai ke Morotai dengan total biaya Rp40 juta. Dengan hadir Tol Laut secara otomatis menghasilkan penurunan harga barang,” ungkap Benny.

Namun, diakuinya penurunan harga barang yang terjadi di Pulau Morotai kurang lebih baru sekitar 5-15%.

“Contohnya, kalau besi beton dulunya Rp90.000 sekarang kurang lebih Rp75.000/batang. Gula, secara partai dulu Rp14.000 sekarang Rp12.000/kg, Beras sebelumnya Rp12.000 sekarang Rp11.500/liter, minyak goreng Rp12.500 turun menjadi Rp12.000/liter. Kenapa minyak goreng tidak terlalu signifikan karena kita mengambil dari pabriknya yang ada di Bitung,” tutur Benny.

Morotai juga telah mampu mengirimkan produk-produk lokal ke Surabaya diantaranya hasil perikanan dan hasil perkebunan melalui Tol Laut. (Khrisna)



# Ditjen Hubla Gelar Mentoring Operator dan Teknisi Telkompel

Guna optimalisasi perangkat *Vessel Traffic Service* (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menyusun Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengenai standarisasi peralatan *Vessel Traffic Service* (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP).

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.287/DJPL/2020, serta standarisasi perawatan peralatan VTS dan SROP melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.294/DJPL/2020.

Dalam rangka implementasi Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut, serta rencana implementasi Uji Coba/*Test Bed* Pemanduan Secara Elektronik (*E-Pilotage*) Tahap II oleh VTS Ditjen Perhubungan Laut, Direktorat Kenavigasian kembali menyelenggarakan kegiatan mentoring operator dan teknisi telekomunikasi pelayaran tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan

meningkatkan kemampuan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan sekaligus untuk memenuhi kemampuan sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran yang diperuntukkan untuk pelayanan Keselamatan Pelayaran.

Demikian sambutan yang disampaikan secara virtual oleh Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan pada acara pembukaan mentoring operator dan teknisi telekomunikasi pelayaran di Medan, (27/8/2020).

Dia menjelaskan, kegiatan ini merupakan kesempatan bagi para peserta menambah ilmu pengetahuan para peserta sehingga dapat mendukung dan meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang operasional maupun teknis peralatan serta pemahaman tentang arti pentingnya dan manfaat sarana telekomunikasi pelayaran sesuai dengan tupoksi di masing-masing Distrik Navigasi.

Menurut Hengki, Surat Keputusan Dirjen terkait standarisasi Peralatan dan Perawatan VTS dan SROP dapat dijadikan pedoman teknis dalam pengadaan dan peningkatan maupun pemeliharaan peralatan VTS dan SROP, yang pada akhirnya dapat membantu VTS dan SROP tersebut beroperasi secara efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan Indonesia.

“Pada kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan pada teman-teman yang hadir untuk selalu melakukan pengawasan/pemantauan terhadap peralatan-peralatannya, supaya tingkat keandalannya dapat kita pertahankan,” imbua Hengki.



Selain optimalisasi perangkat VTS, tentunya memerlukan kesiapan dan pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di stasiun VTS, sehingga perlu dilakukan peningkatan dan *refresher* melalui program mentoring seperti yang dilaksanakan pada saat ini.

Pada kesempatan ini, Hengki juga mengingatkan dan mengajak kepada para peserta untuk selalu menjaga kesehatan karena pandemi covid 19 sampai saat ini masih tetap menjadi musuh kita bersama, antara lain untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak serta mencuci tangan.

“Sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan pada beberapa kesempatan mohon semua pegawai untuk bisa mengendalikan dirinya masing-masing untuk menjaga kesehatan agar kita tetap dapat beraktivitas dan melaksanakan pelayanan dengan baik,” tuturnya.

Terkait rencana implementasi Pemanduan Secara Elektronik (*E-Pilotage*), Hengki mengingatkan bagi empat Pelabuhan yang telah mengikuti Uji Coba/*Test Bed* Pemanduan Secara Elektronik (*E-Pilotage*) tahap 1 untuk secara konsisten melaksanakan uji coba pada kapal kapal yang beroperasi di pelabuhannya masing masing sehingga pemanfaatan pelayanan VTS dapat optimal dilaksanakan.

Sedangkan untuk rencana Uji Coba/*Test Bed* Pemanduan Secara Elektronik (*E-Pilotage*) tahap 2, bagi semua distrik navigasi yang telah memiliki peralatan VTS segera menyiapkan Sarana, Prasarana dan SDM untuk meng implementasikan *E-Pilotage* yang sudah dijabarkan pada tahap pertama. “Sehingga nanti pada akhir tahun 2020, kita mendapatkan formulasi yang utuh terkait dng implementasi *E-Pilotage* di seluruh pelabuhan yang dapat dilayani oleh VTS,” kata Hengki. (Khrisna)



# Indonesia Sampaikan Implementasi B20 dan B30 di Sidang AMTWG

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap *The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Green Ship Strategy*, Pemerintah Indonesia sampaikan pengimplementasian B-20 *Energy Efficiency* dan *Data Collecting System* pada kapal nasional untuk menghitung gas buang kapal pada Sidang *ASEAN Maritime Transport Working Group (AMTWG) ke-39* yang diselenggarakan secara virtual, Kamis, (27/8/2020).

*Green Ship Strategy* adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh Jepang dan telah diadopsi pada pertemuan *18th Senior Transport Officials Meeting (STOM)+Japan and 17th ASEAN Transport Minister (ATM) Meeting+Japan* pada November 2019.

“Saat ini Indonesia sudah menggunakan

B-20 dan B-30. Sedangkan untuk B-50 saat ini sedang dalam uji coba dan ditargetkan dapat dipasarkan secara komersil untuk kapal-kapal Indonesia pada akhir tahun 2020,” ujar Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Yudhonur Setiaji, yang bertindak



selaku *Alternante Head of Delegation* (HOD) Indonesia pada pertemuan tersebut.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga melaporkan dan membahas perkembangan proyek-proyek transportasi laut dibawah Kuala Lumpur *Transport Strategic Plan* (KLTP) 2016-2025 yang perlu ditindaklanjuti, antara lain tentang persiapan pengoperasian pelabuhan dan kapal Ro-Ro rute Dumai-Malaka dan rute lainnya. Selain itu juga perkembangan implementasi *Ballast Water Management Convention* untuk kapal yang beroperasi di Selat Malaka dan Singapura; Perkembangan *Joint Hydrographic Survey* di Selat Malaka dan Selat Singapura (SOMS); perkembangan pembahasan *draft text ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue Cooperation* pada pertemuan ASEAN Transport SAR FORUM (ATSF); perkembangan *National Work Plan* kegiatan MEPSEAS Project; serta perkembangan praktek serta pedoman terkait rencana pemulihan pelayaran pasca pandemi Covid-19.

Indonesia telah melakukan peningkatan dalam pengimplementasian *Electronic Data Interchange*, antara lain dengan me-

nerapkan *online delivery orders* (DO Online) untuk aktivitas impor barang dan juga penerapan e-sertifikat.

“Saat sudah ada lima Pelabuhan di Indonesia yang menerapkan DO Online untuk impor barang, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar dan Tanjung Emas. Selain itu, saat ini, kami juga tengah mengembangkan sistem informasi maritim untuk sertifikasi kapal dan pelaut yang memenuhi standar IMO,” ujar Yudho.

Terkait perkembangan Rute Kapal RoRo Dumai-Malaka, Yudho menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia telah berkomitmen mempertahankan rute ini, namun ada beberapa permasalahan teknis yang masih perlu didiskusikan. “Kami (Indonesia dan Malaysia) telah merencanakan Pertemuan *2nd Sub-Committee Meeting* pada bulan Juli 2020 lalu untuk membahas masalah teknis seperti iso komoditas, Surat Ijin Mengemudi, Jenis Kendaraan dan Karantina. Namun karena ter kendala oleh pandemi Covid-19, kami akan merencanakan ulang untuk mengadakan pertemuan tersebut,” jelasnya.

(Mayan)

# Kemenhub Gelar Pelatihan IMSBC *Code* Guna Optimalisasi Pengawasan Angkutan Barang



Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) bekerjasama dengan AMSAT International menggelar pelatihan *International Maritime Solid Bulk Cargo Code* (IMSBC Code) guna meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sehubungan dengan pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang pengangkutan muatan barang berbahaya curah padat.

Pelatihan dibuka Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo secara virtual melalui *zoom Meeting* yang dihadiri Kepala Kantor BTKP Gigih Retnowati serta Perwakilan AMSAT International di Indonesia, Linda Kristanty di Kantor BTKP Jakarta, Kamis (26/8/2020).

“Kegiatan pengawasan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Ditjen Perhubungan Laut, sehingga dalam penanganannya semua jajaran harus berpedoman pada aturan yang berlaku secara nasional maupun aturan internasional seperti ketentuan yang dipersyaratkan dalam IMSBC Code,” urai Dirjen Agus.

Sedangkan SDM yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang penanganan muatan curah padat terutama barang curah padat kategori A & B yang dimiliki Ditjen Perhubungan Laut masih perlu ditingkatkan.

“Terkait dengan hal ini, maka Pelatihan IMSBC Code merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para petugas di lapangan di bidang penanganan dan pengangkutan barang berbahaya curah padat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan IMSBC Code,” katanya.

Kepala Kantor BTKP Gigih mengatakan, meningkatkan peluang usaha termasuk investasi di bidang muatan curah



**Kegiatan pengawasan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Ditjen Perhubungan Laut, sehingga dalam penanganannya semua jajaran harus berpedoman pada aturan yang berlaku secara nasional maupun aturan internasional seperti ketentuan yang dipersyaratkan dalam IMSBC Code**



Pengawasan penanganan dan pengangkutan barang berbahaya itu berlaku tidak hanya di kapal saja, tetapi juga pada saat barang berbahaya diturunkan dari kapal dan disimpan sementara di area pelabuhan.

Hal ini untuk menghindari adanya potensi bahaya yang tidak kita inginkan bersama seperti kejadian di Pelabuhan Beirut dan Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu.

Saat ini muatan curah padat terutama kategori A & B oleh industri pelayaran dunia telah dianggap sebagai salah satu jenis muatan yang memiliki risiko tinggi dan sangat berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim bila tidak ditangani secara baik.

padat, saat ini Pemerintah terus memberi peluang kepada investor agar berinvestasi di Indonesia.

Hal ini tentunya akan berdampak meningkatnya muatan barang curah padat yang akan diangkut melalui pelabuhan di Indonesia.

“Untuk itu, maka guna mengantisipasi naiknya angkutan muatan barang curah padat tersebut, Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut bertanggung-jawab memastikan agar para petugas di lapangan sudah siap dalam kegiatan pengawasan muatan barang curah padat serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerja masing-masing,” kata Gigih. (Silo)



## Kemenhub Nyatakan 30 Pandu Laut Dalam Lulus Pelatihan

**Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Pandu Laut Dalam Angkatan IV Tahun 2020 yang dilaksanakan melalui virtual.**

Penutupan pelatihan ini diikuti 30 orang peserta yang berasal dari perwakilan PT Pelabuhan Indonesia (persero) I sebanyak 10 peserta dan PT Pelabuhan Indonesia (persero) III sebanyak 20 peserta yang semuanya dinyatakan lulus.

Direktur Kepelabuhanan Subagiyo dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal, Capt. Yohsua P. S. I. Antonie mengatakan bahwa penyelenggaraan Pelatihan Pandu Laut Dalam oleh Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang andal, kompeten dan profesional serta menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pandu yang dapat melaksanakan pelayanan pemanduan di perairan laut dalam secara umum dan khususnya pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura serta persiapan pelayanan pemanduan di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok.

Kepala Seksi SDM Pemanduan dan Penundaan Kapal, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan, Patrick Pardede mengatakan, pelaksanaan pelatihan pandu laut dalam angkatan IV tahun 2020 telah dilaksanakan selama 41 hari dimulai sejak 15 Juli 2020-24 Agustus 2020 yang terdiri dari pembekalan, pembelajaran teori dan evaluasi yang telah dilaksanakan selama selama 30 hari di Kampus 1 PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PT. PMLI).

Praktik simulator yang telah dilaksanakan selama empat hari di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Kemenhub dan praktik memandu kapal yang telah dilaksanakan selama tujuh hari di Perairan Pandu Wilayah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas I Tanjung Balai Karimun. (Presti)



## 58 Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Dikukuhkan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengukuhkan 58 orang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK). Pengukuhan PPKK tersebut terdiri dari *Marine Inspector* (MI A) dan *Asisten Marine Inspector* (MI B).

“Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ini adalah ujung tombak Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam mengawasi kelaiklautan kapal berbendera Indonesia,” ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta di Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

Menurutnya, baik atau tidaknya Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal akan mencerminkan seberapa bagusny keselamatan kapal di Indonesia.

“Kami melakukan pengujian kelayakan kemampuan melalui metode penilaian menggunakan *Computer Base Assessment* dan ujian lisan oleh tim penguji yang

berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Praktisi Maritim Senior sesuai bidangnya,” ujarnya. Dia menjelaskan, pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu para peserta mendapatkan tambahan ilmu di bidang kelaiklautan kapal terbaru oleh para narasumber.

Peserta pengukuhan terdiri dari 30 orang peserta *Marine Inspector* (MI A) dan 30 Asisten *Marine Inspector* (MI B) yang terdiri dari peserta dengan latar belakang sesuai keahlian yang dipersyaratkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) yaitu Perwira Pelayaran (Nautika/ Tehnika) dan Sarjana Teknik Perkapalan. (Mayan)



Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ikuti Webinar Hukum Laut yang dilaksanakan oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut dengan tema Penentuan Zona Perlindungan Lingkungan Maritim, 27 Agustus 2020



Dermaga Marabatuan dan Dermaga Matasiri Kotabaru, Kalimantan Selatan yang dibangun Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut siap dioperasikan. Uji coba dilaksanakan 19 Agustus 2020

PT Siam Maspion Terminal (SMT) resmi mengelola Terminal Siam Maspion di Pelabuhan Gresik yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian konsesi antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT SMT di Surabaya, Jawa Timur, 8 Agustus 2020

